



DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
BENGKAYANG

L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2025





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
A. RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH DAERAH (RENSTRA)	34
B. PERJANJIAN KINERJA 2025	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	57
B. REALISASI ANGGARAN	121
C. HAMBATAN DAN KENDALA	123
BAB IV PENUTUP	126
A. KESIMPULAN	126
B. SARAN	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.....	5
Gambar I.2 Bagan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang.....	20



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	22
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel I.3 Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Penjurangan.....	25
Tabel I.4 Data Pegawai Yang Meduduki Jabatan Eselon	27
Tabel I.5 Penganggaran Belanja Dinas Perhubungan	28
Tabel I.6 Rekapitulasi Inventaris Sarana dan Prasarana	29
Tabel I.7 Isu Strategi Perangkat Daerah	32
Tabel II.1 Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang	44
Tabel II.2 Hubungan Misi Daerah dan Pusat	46
Tabel II.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan 2025 (berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026).....	50
Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan 2025 (berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029).....	52
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 2025.....	54
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 2025.....	55
Tabel III.1 Interval Nilai Realisasi Kinerja.....	57
Tabel III.2 Program Anggaran Dinas Perhubungan.....	60
Tabel III.3 Sasaran Dinas Perhubungan	68
Tabel III.4 Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan.....	69
Tabel III.5 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 1	71
Tabel III.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	72
Tabel III.7 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025.....	73
Tabel III.8 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	74
Tabel III.9 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 1	75
Tabel III.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 2	77
Tabel III.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.....	79
Tabel III.12 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025.....	81
Tabel III.13 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	83
Tabel III.14 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 2	85
Tabel III.15 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 1	91
Tabel III.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	92
Tabel III.17 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025.....	93
Tabel III.18 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	94
Tabel III.19 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 1	96



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.20 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategi 2	97
Tabel III.21 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	98
Tabel III.22 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025	99
Tabel III.23 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	100
Tabel III.24 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 2	102
Tabel III.25 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategi 3	104
Tabel III.26 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3	105
Tabel III.27 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025	107
Tabel III.28 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	108
Tabel III.29 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 3	110
Tabel III.30 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 4	114
Tabel III.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4	115
Tabel III.32 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025	116
Tabel III.33 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD	117
Tabel III.34 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 4	119
Tabel III.35 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2025	122
Tabel III.36 Permasalahan dan Solusi	123



KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya, atas dasar amanah yang dibeban tugaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun berdasarkan struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Dalam regulasi tersebut, Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Penguatan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah merupakan harapan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yakni pemerintahan yang kinerjanya direncanakan dengan baik, dapat diukur secara jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah adalah melalui penyusunan laporan kinerja. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi alat pengelolaan (manajemen) kinerja sekaligus sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pencerahan dan mendukung pengembangan kapasitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, serta instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah disusun

Bengkayang, Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKAYANG



FRANCISCA CYNTHIA ENTO, S.P.,M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.19750614 200304 2 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara umum, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, capaian kinerja mencapai 100,64% dari 8 indikator yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai bahkan melampaui sasaran yang direncanakan. Sementara itu, apabila mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029, capaian kinerja mencapai 100,39% dari 10 indikator kinerja, mencerminkan konsistensi kinerja organisasi dalam masa transisi perencanaan strategis. Di sisi lain, realisasi anggaran yang mencapai 84,06% menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi penyerapan anggaran agar selaras dengan capaian kinerja yang telah dicapai.

Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui percepatan kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kerja sama antarinstansi juga akan terus dilakukan agar pelayanan transportasi dapat berjalan lebih efisien dan merata di seluruh wilayah.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan upaya nyata dari setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian hal tersebut adalah melalui penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penilaian dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu kunci dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan capaian kinerja yang disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun anggaran oleh masing-masing instansi pemerintah, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, guna mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai. LKIP Dinas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Perhubungan Kabupaten Bengkayang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, yaitu Bupati, DPRD, dan masyarakat, atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan serta pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Mengacu pada ketentuan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja, alat pengambilan keputusan, serta acuan dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya Dinas Perhubungan.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Secara khusus, tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian kinerja yang telah direncanakan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, dan efektif. Melalui SAKIP, diharapkan tercipta budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar output administratif, serta mendorong aparatur negara untuk terus melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Penerapan SAKIP ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis berikut:

a. Mewujudkan Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Setiap instansi diharapkan dapat menunjukkan kinerjanya secara terukur, bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengelola sumber daya secara efisien, efektif, dan berorientasi hasil (*outcome*). Dengan demikian, instansi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bernilai tambah bagi masyarakat.

b. Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

SAKIP mendorong keterbukaan informasi publik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta bagaimana penggunaan anggaran publik dipertanggungjawabkan.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dengan sistem yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi, memberikan masukan, dan turut serta dalam proses pembangunan. Hal ini memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Menumbuhkan dan Memelihara Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Kinerja yang baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dengan menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, pemerintah dapat membangun serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, serta Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II (Kepala Dinas) yang membawahi tiga Pejabat Eselon III (Sekretaris dan dua Kepala Bidang) serta enam Pejabat Eselon IV (Kepala Subbagian dan Kepala Seksi).

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

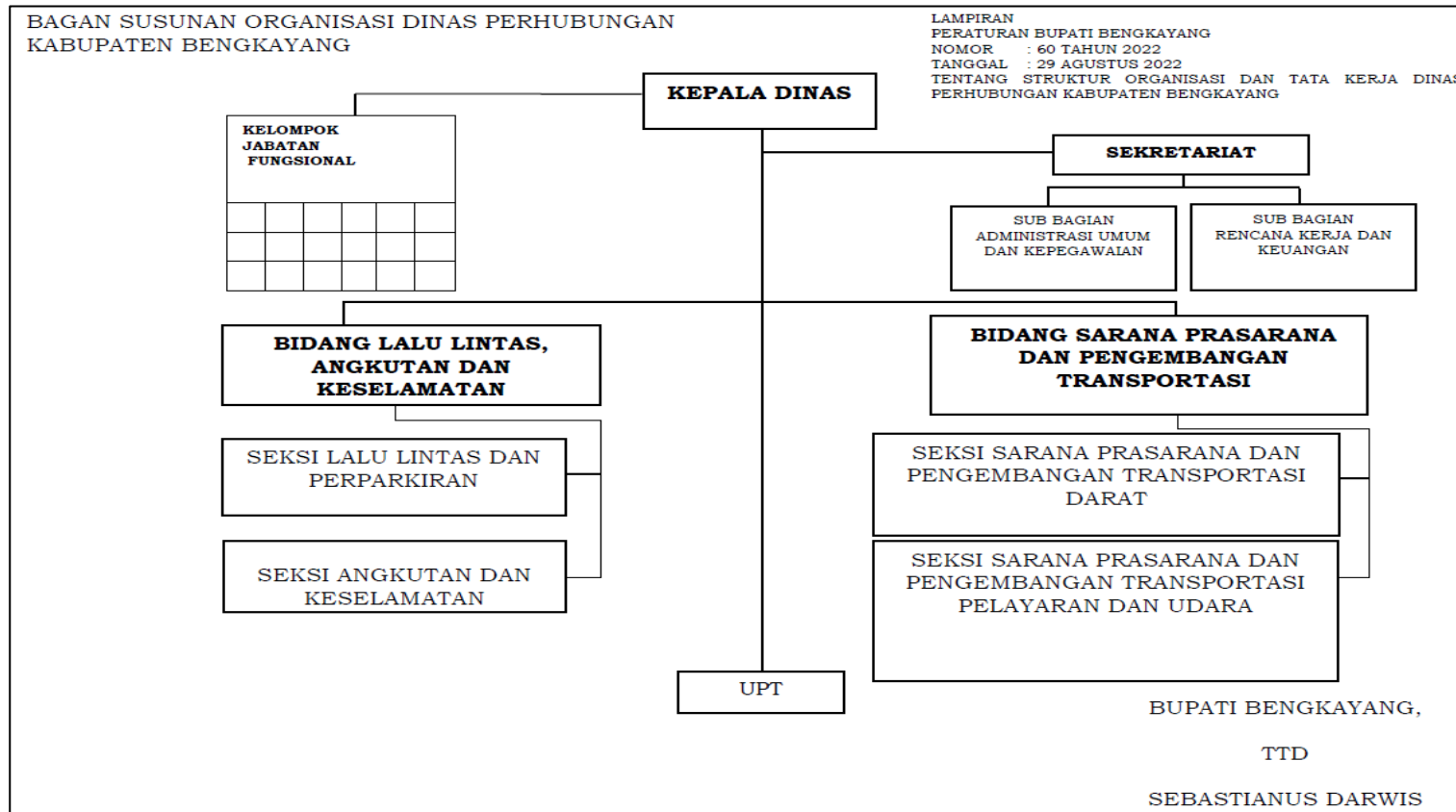


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah 2025

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : Perbup Bengkulu Tengah No.60 Tahun 2022

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah



2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Tugas Pokok Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.

b. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain di Bidang Perhubungan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas dalam hal berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.



b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, penyelenggaraan surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja;
2. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
5. pengelolaan urusan rumah tangga;
6. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
7. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dinas dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, inventarisasi barang, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.



2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan rencana kerja dan keuangan Dinas Perhubungan dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
- c. pelaksanaan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e. penyusunan laporan keuangan;
- f. verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- g. pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- i. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- j. penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan

Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dibantu oleh:

1. Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran

Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan perparkiran.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan perparkiran;
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten;
- f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- h. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- i. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- j. Fasilitasi penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Fasilitasi penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- l. Fasilitasi penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. Fasilitasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- n. Fasilitasi penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- o. pemberian fasilitasi Pengawasan Pejabat Negara/Daerah;



- p. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Angkutan dan Keselamatan

Seksi Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan angkutan dan keselamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Angkutan dan Keselamatan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;



- i. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. Fasilitasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
- k. Fasilitasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- l. Fasilitasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
- m. Fasilitasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- o. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- p. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- q. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- r. pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
- s. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- t. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas;



- u. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi terdiri dari:

1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat
Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang



Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi dalam pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
- c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan.

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi dalam pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pemberian pelayanan bidang perhubungan;
2. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi bidang perhubungan;
3. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait berkaitan dengan bidang perhubungan;
4. pelaksanaan verifikasi dan validasi data bidang perhubungan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

5. pelaporan dan pertanggung jawaban bidang perhubungan kepada dinas instansi pelaksana;
6. penghimpunan, pengagendaan dan penyimpanan dokumen bidang perhubungan;
7. pertanggung jawaban bidang perhubungan kepada Instansi pelaksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Bupati No 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyelenggarakan urusan antara lain surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, inventarisasi barang, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu,
- e. hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- g. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- h. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- i. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- j. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

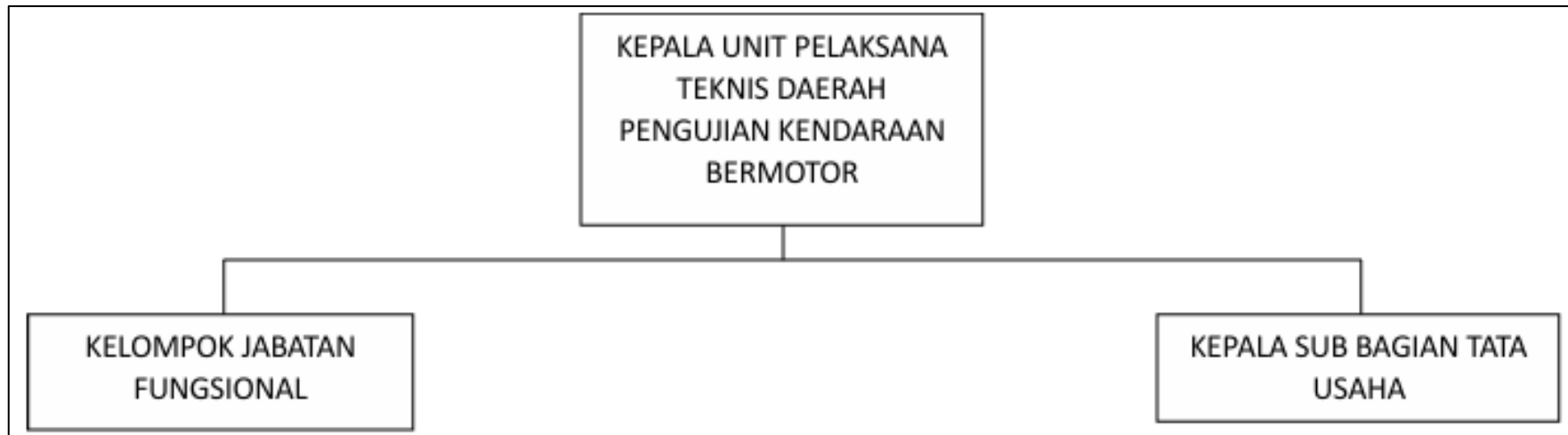
- k. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- l. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber : Peraturan Bupati No 24 Tahun 2023

Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkulu Tengah



f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur (SDA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang terdiri atas:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercatat sebanyak 37 orang yang tersebar dalam empat golongan, yaitu Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 13 orang, Golongan IV sebanyak 4 orang, dan Golongan I sebanyak 1 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS berada pada golongan menengah yang berperan penting dalam mendukung kinerja organisasi, baik pada aspek administratif maupun teknis pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 15 orang, terdiri dari Golongan V sebanyak 10 orang, Golongan VII sebanyak 4 orang, dan Golongan IX sebanyak 1 orang. Keberadaan PPPK ini melengkapi struktur kepegawaian dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan serta pelayanan di lingkungan instansi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Selain itu, terdapat PPPK paruh waktu sebanyak 1 orang, sehingga total keseluruhan pegawai menjadi 53 orang. Secara umum, seluruh pegawai tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam perencanaan, pengendalian, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan guna mendukung kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat.

Komposisi pegawai tersebut mencerminkan kondisi riil sumber daya manusia yang tersedia saat ini, yang secara langsung turut memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan sebaran pegawai berdasarkan golongan kepegawaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel I.1 berikut ini.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	TOTAL (Orang)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan IV	4	37 Orang
2	Golongan III	20	
3	Golongan II	13	
4	Golongan I	0	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
1	Golongan IX	1	15 Orang
2	Golongan VII	4	
3	Golongan V	10	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu			
1	-	1	1 Orang
TOTAL KESELURUHAN			53 Orang

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan pegawai, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 37 orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam. PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 9 orang dan S2 sebanyak 3 orang, menunjukkan adanya sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat pula PNS dengan pendidikan D4 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 12 orang, D2 sebanyak 2 orang, SMA/SMK sebanyak 3 orang, dan Paket B/C sebanyak 2 orang, yang menggambarkan variasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan tugas di instansi.

Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 15 orang dengan komposisi pendidikan yang didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 10 orang. Selain itu, terdapat PPPK berpendidikan D3 sebanyak 4 orang dan S1 sebanyak 1 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK memiliki latar belakang pendidikan menengah yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pelayanan di lingkungan kerja.

Selain PNS dan PPPK penuh waktu, terdapat pula PPPK paruh waktu sebanyak 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK. Dengan demikian, total keseluruhan pegawai adalah 53 orang. Secara umum, keragaman tingkat pendidikan ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh.



Rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	TOTAL (Orang)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Pendidikan S2	3	37 Orang
2	Pendidikan S1	9	
3	Pendidikan D4	6	
4	Pendidikan D3	12	
5	Pendidikan D2	2	
6	Pendidikan SMA/SMK	3	
7	Pendidikan Paket B/C	2	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
1	Pendidikan S1	1	15 Orang
2	Pendidikan D3	4	
3	Pendidikan SMA/SMK	10	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu			
1	Pendidikan SMA/SMK	1	1 Orang
TOTAL KESELURUHAN			53 Orang

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Dari total 53 orang pegawai tersebut, terdapat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang yang sedang mengikuti izin belajar. Izin belajar tersebut berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang. Kondisi ini menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak terlibat secara penuh dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari, sehingga diperlukan penyesuaian pembagian tugas dan tanggung jawab guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



c. Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Penjurangan

Berdasarkan Tabel I.3, jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjurangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang tercatat sebanyak 4 orang. Adapun rinciannya terdiri dari 1 orang yang telah mengikuti PIM II, 2 orang mengikuti PIM III, dan 1 orang mengikuti PIM IV. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat struktural telah memiliki bekal kompetensi kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatan, sehingga mampu menjalankan fungsi manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Pelatihan penjurangan tersebut merupakan instrumen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, khususnya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Melalui pelatihan ini, pegawai dibekali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program kerja, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Tabel I.3 Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	2
3	PIM IV	1
Jumlah		4

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Keikutsertaan pegawai dalam Pelatihan Kepemimpinan (PIM) juga berperan dalam membentuk sikap dan karakter kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Kompetensi yang diperoleh melalui PIM diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, koordinasi antarunit kerja, serta akuntabilitas dalam



pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 6 (enam) orang pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan penjurangan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan perencanaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah agar pejabat yang belum mengikuti PIM dapat difasilitasi sesuai jenjang jabatannya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang secara berkelanjutan.

d. Data Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang saat ini memiliki total sebanyak 10 orang pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon. Rincian pejabat eselon tersebut adalah sebagai berikut: 1 (satu) orang menduduki jabatan Eselon II, yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama; 1 (satu) orang menduduki jabatan Eselon III.a, yang termasuk dalam kategori administrator; 2 (dua) orang menduduki jabatan Eselon III.b; serta 6 (enam) orang menduduki jabatan Eselon IV.a, yang termasuk dalam kategori pengawas.

Keberadaan pejabat struktural ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, khususnya dalam hal pengambilan keputusan strategis, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan operasional di lapangan. Komposisi jabatan eselon ini juga mencerminkan struktur organisasi yang ada dan menunjukkan distribusi tanggung jawab sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan jenis jabatan eselon yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Tabel I.4 berikut ini.

Tabel I.4 Data Pegawai Yang Meduduki Jabatan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Eselon III A (Sekretaris)	1
3	Eselon III B (Kepala Bidang)	2
4	Eselon IV A (Kassubag/Kasi)	6
Jumlah		10

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

4. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang tahun ini sebesar Rp6.362.345.566 yang didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp6.045.846.966 atau 95,03% dari total anggaran, yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3.550.121.329 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp2.495.725.637, sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp316.498.600 atau 4,97% yang dialokasikan untuk belanja peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, sehingga secara umum struktur anggaran lebih berfokus pada pembiayaan kegiatan operasional dibandingkan dengan investasi aset atau pengembangan sarana dan prasarana.

Tabel I.5 Penganggaran Belanja Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Persentase
1	5.1	Belanja Operasi	Rp6.045.846.966	95,03%
	5.1.01	Belanja Pegawai	Rp3.550.121.329	
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.495.725.637	
2	5.2	Belanja Modal	Rp316.498.600	4,97%
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp47.730.800	
	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp227.000.000	
	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp41.767.800	
Total			Rp6.362.345.566	100%

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

5. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data aset Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Tabel I.6 total jumlah aset sebanyak 6.913 unit/buah/dan sejenisnya dengan nilai keseluruhan mencapai Rp43.335.199.731,15. Aset tersebut terdiri dari tanah sebanyak 10 bidang senilai Rp172.076.840, peralatan dan mesin sebanyak 244 unit senilai Rp10.214.500.699, serta gedung dan bangunan sebanyak 97 unit dengan nilai Rp18.032.353.323. Selain itu, terdapat jalan, irigasi, dan jaringan sebanyak 5.631 unit senilai Rp3.110.203.441, konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 4 unit senilai Rp145.090.599, serta aset lainnya sejumlah 927 unit dengan nilai tertinggi, yaitu Rp21.796.510.525,61.

Sementara itu, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp10.135.535.696,46 yang mengurangi nilai aset secara keseluruhan. Data ini mencerminkan komposisi aset tetap yang cukup beragam, dengan nilai terbesar berasal dari kategori aset lainnya dan gedung/bangunan menunjukkan bahwa aset yang dimiliki cukup signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

Tabel I.6 Rekapitulasi Inventaris Sarana dan Prasarana

NO.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	Tanah	10	172.076.840,00	Berdasarkan data KIB A
2	Peralatan dan Mesin	244	10.214.500.699,00	Berdasarkan data KIB B
3	Gedung dan bangunan	97	18.032.353.323,00	Berdasarkan data KIB C
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	5631	3.110.203.441,00	Berdasarkan data KIB D
5	Konstruksi dalam pengerjaan	4	145.090.599,00	Berdasarkan data KIB F
	Akumulasi penyusutan	0	-10.135.535.696,46	
6	Aset lainnya	927	21.796.510.525,61	Berdasarkan data KIB
Jumlah Aset		6913	43.335.199.731,15	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS

Permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan manajerial Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
 - a. Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan kinerja dan kegiatan rutin administrasi perkantoran.
 - c. Belum tersedianya SDM bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut.
 - d. Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Bertambahnya jumlah kendaraan yang mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas;
 - b. Belum tersedia angkutan umum yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan terjangkau;
 - c. Belum optimalnya jaringan trayek yang terlayani;
 - d. Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan umum;
 - e. Belum tersedianya angkutan umum yang tepat waktu;
 - f. Tingginya penggunaan angkutan ilegal (kendaraan bak terbuka/*pick up* / angkutan barang);
 - g. Belum tersedianya terminal tipe c untuk angkutan umum di Kec. Bengkayang dan Kec. Sanggau Ledo.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

- h. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan SPM terminal tipe c di Kec. Seluas dan Kec. Sungai Raya.
 - i. Belum tersedianya lokasi fasilitas parkir khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota.
 - j. Belum terselenggaranya pelayanan pelabuhan pengumpan lokal laut atau sungai di Kabupaten Bengkayang.
 3. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana Keselamatan Jalan
 - a. Kurangnya jumlah kelengkapan sarana prasarana keselamatan jalan;
 - b. Banyaknya perlengkapan keselamatan jalan yang rusak;
 - c. Kurangnya jumlah halte untuk peningkatan ketertiban masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas yang tersedia;
 - d. Masih rendahnya rasio ketercukupan fasilitas keselamatan lalu lintas dengan panjang jalan di Kabupaten Bengkayang (PJU, APILL, dan Rambu Lalu Lintas).

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perhubungan darat dan laut;
2. Peningkatan angka kecelakaan setiap tahunnya;
3. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas perhubungan; dan
4. Perlunya optimalisasi kontribusi sektor perhubungan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.



Tabel I.7 Isu Strategi Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah penduduk yang semakin meningkat	Belum terpenuhinya terminal tipe c sesuai standar untuk angkutan umum di Kabupaten Bengkulu	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	Dampak Transportasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Transportasi	Emisi Gas Buang	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan di bidang Perhubungan Darat dan Laut
Meningkatnya Pengunjung Pariwisata ke Pulau-Pulau	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan di Dermaga/Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kabupaten Bengkulu		Perubahan Iklim	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Terkait Dengan Infrastruktur Perhubungan	Polusi Udara	
Meningkatnya Jaringan Jalan	Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Bengkulu	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	peningkatan efisiensi dan keberlanjutan transportasi publik dan pribadi	Pemanfaatan Transportasi Publik yang Ramah Lingkungan	Penggunaan Bahan Bakar	Angka kecelakaan yang meningkat setiap tahunnya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Semakin tingginya Kepadatan Arus Lalu Lintas	Kurang optimalnya pengaturan dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	pengelolaan limbah dan sampah dari transportasi	Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Infrastruktur Perhubungan	Dampak Infrastruktur Transportasi Terhadap Ekosistem dan Konservasi Lingkungan.	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas Perhubungan
Bertambahnya Jumlah Kendaraan	Kurang optimalnya kontribusi retribusi di bidang Perhubungan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang	Ketimpangan Sosial Ekonomi	Dampak Transportasi Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Transportasi	Emisi Gas Buang	Optimalisasi kontribusi di bidang Perhubungan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Belum tercukupinya SDM bidang Perhubungan yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Perhubungan Darat		Perang dagang antara AS dan Tiongkok mengganggu rantai pasok global	Kesenjangan digital di wilayah-wilayah yang belum siap infrastruktur dan SDM-nya.	Ketimpangan kualitas tenaga kerja antar daerah	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH DAERAH (RENSTRA)

Infrastruktur merupakan salah satu faktor dalam mendukung pembangunan suatu daerah, karena berperan sebagai elemen pendukung bagi seluruh sektor pembangunan. Peran strategis infrastruktur sangat menentukan dalam keberhasilan pemerataan pembangunan yang berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, rendahnya tingkat aksesibilitas akibat kurang optimalnya kinerja infrastruktur transportasi menyebabkan pelayanan dasar belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi sektor usaha masyarakat, serta menghambat optimalisasi pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung terwujudnya kondisi ideal Kabupaten Bengkayang sebagaimana yang ditetapkan dalam slogan pembangunan daerah hingga tahun 2029, yaitu:

"SDM MANTAP, BENGKAYANG GEMILANG.

Penguatan SDM yang mantap memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, SDM Mantap menjadi bagian dari arah pembangunan daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak, seimbang secara jasmani dan rohani, serta memiliki daya saing.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai SDM Mantap, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui: penyempurnaan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata “**MANTAP**” yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Maju dalam 3 Aspek, Yaitu meliputi aspek pendidikan dan kesehatan, Aspek Ekonomi (ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif Dan Mandiri) dan Infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Adil dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, Insfrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Nasionalis dan berakhlak mulia serta berkomitmen menjaga keharmonisan dan mewujudkan masyarakat Bengkayang yang berbudaya.

Terdepan dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, terdepan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terdepan dalam mewujudkan desa mandiri serta terdepan dalam mengawal terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan bebas korupsi, serta terdepan dalam pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Amanah dalam mengemban tugas bersih, tegas, efektif, dan efisien.

Peduli dalam 2 aspek yaitu kepedulian Pemerintah kepada masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kata "**GEMILANG**" dalam slogan tersebut memiliki makna yang mendalam dan luas. "Gemilang" mencerminkan kecemerlangan dan keunggulan yang dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di tingkat lokal maupun nasional. Istilah ini menggambarkan bagaimana masyarakat setempat tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap citra dan reputasi daerah serta negara.

Makna "Gemilang" juga menyoroti kesungguhan dan kegigihan yang ditunjukkan oleh warga Kabupaten Bengkayang. Ini adalah gambaran dari tekad dan dedikasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Kesungguhan ini tidak hanya terbatas pada upaya individu, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat kolektif yang mendorong kemajuan dan inovasi.

Selain itu, "Gemilang" mencerminkan kesanggupan masyarakat untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Mereka menunjukkan kemampuan untuk memajukan diri dan daerah mereka dengan cara yang kreatif dan produktif, serta berperan aktif dalam memajukan citra positif Kabupaten Bengkayang di mata masyarakat nasional dan internasional.

Dengan demikian, penggunaan kata "Gemilang" dalam slogan ini menegaskan komitmen masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk mencapai puncak kecemerlangan melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tak pernah padam, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi daerah dan negara secara keseluruhan.

Dalam visi dan misi Bupati Bengkayang terpilih, salah satu isu strategis yang diangkat adalah pengembangan sarana dan prasarana dasar, pengelolaan kawasan pesisir dan kawasan perbatasan,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan kondusivitas daerah. Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi dasar perumusan visi daerah, yaitu "Bengkayang Maju, Bengkulu Mandiri."

Konsep Bengkulu Maju diwujudkan melalui berbagai indikator yang mencerminkan tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkulu untuk periode 2025-2029. Indikator tersebut meliputi: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi secara cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan transportasi yang efisien dan terintegrasi), *smart healthcare* (pengelolaan layanan kesehatan dan lingkungan yang berkualitas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang efisien dan berkelanjutan), *smart building* (penataan ruang dan bangunan yang modern dan fungsional), serta *smart citizen* (pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan partisipatif). Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga difokuskan pada pembukaan akses desa-desa sangat tertinggal sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian lokal dan mendorong terwujudnya desa mandiri.

Sementara itu, konsep Bengkulu Mandiri menekankan pada kemampuan daerah dan masyarakatnya dalam mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Kemandirian daerah ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas masyarakat dalam mengatasi permasalahan daerah secara mandiri, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu diarahkan untuk menjadi daerah yang sejajar dengan wilayah lain yang lebih maju, melalui penguatan kapasitas internal dan daya saing berbasis potensi lokal.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi "Bengkayang Maju, Bengkulu Mandiri", khususnya dalam aspek *smart infrastructure* dan *smart mobility*, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu menghadapi sejumlah tantangan strategis terkait pelayanan transportasi, baik darat maupun laut. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

terbatasnya jangkauan layanan angkutan umum di wilayah-wilayah terpencil.

Terdapat tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Tujuh Belas, dan Kecamatan Siding, yang belum terlayani angkutan umum secara harian. Ketiga kecamatan tersebut berjarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten, masing-masing 57,39 km, 61,60 km, dan 103,68 km, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan aksesibilitas transportasi. Ketiadaan layanan angkutan umum mendorong penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat, yang tidak seluruhnya memiliki kecakapan berkendara, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Padahal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 139 ayat (3) dan (4), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, dalam mendukung pengembangan kawasan pesisir dan pariwisata berbasis kelautan, Kabupaten Bengkayang memiliki Pulau Lemukutan sebagai salah satu destinasi unggulan. Moda transportasi utama menuju pulau tersebut adalah kapal laut, namun saat ini masih terdapat keterbatasan dalam sistem perizinan berlayar serta kelengkapan sarana keselamatan pelayaran. Pada tahun ini, proses perizinan kapal-kapal penumpang sedang dalam tahap pengurusan oleh pihak terkait, dan pemilik kapal diwajibkan untuk segera melengkapi alat keselamatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, diperlukan pengembangan pelabuhan pengumpan sekunder yang terintegrasi, termasuk di Pulau Lemukutan. Alur pelayaran eksisting yang perlu diperkuat mencakup rute: Pelabuhan Teluk Suak - Pulau Kabung - Pulau Penata Kecil - Pulau Penata Besar - Pulau Lemukutan - Pulau Randayan - Selat Laut Natuna. Peningkatan konektivitas melalui transportasi laut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

ini sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung penguatan sektor ekonomi lokal dan pariwisata daerah.

Dengan memperkuat sektor transportasi darat dan laut secara terpadu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Perhubungan turut berkontribusi langsung dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang cerdas, merata, dan berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam semangat *smart development* yang menjadi landasan utama visi "Bengkayang Maju, Bengkulu Mandiri".

1. Visi

Berdasarkan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum Kabupaten Bengkulu dengan mempertimbangkan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan, dan keberhasilan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu tahun 2025-2029 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**

Makna filosofi dan pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, Bengkulu sebagai daerah yang maju di sisi ekonomi dan sisi sosial diartikan sebagai Bengkulu daerah yang maju di sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari ekonomi Bengkulu dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Selanjutnya masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya



alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizen* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang menjadi daerah dengan Kemandirian diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.

Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar



dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja.

Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan. "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" diartikan sebagai pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkayang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, pembangunan di Bengkayang berkomitmen untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktek-praktek ramah lingkungan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan.

Dengan demikian, Bengkayang tidak hanya membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang. Secara keseluruhan, konsep "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" menggambarkan komitmen Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan yang responsif terhadap lingkungan dalam setiap aspek kegiatan pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tata kehidupan masyarakat yang seimbang.



Selain Visi Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan juga ditopang Pemerintahan yang bersih dan terbuka”

Pemerintahan yang bersih, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan berkelanjutan yang ingin dicapai. Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029, yaitu "Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan", memiliki keterkaitan dan selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan", serta mendukung arah Visi Pembangunan Nasional 2025-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Ketiganya menekankan pentingnya kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.



Tabel II.1 Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang



2. Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkayang tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II.2 Hubungan Misi Daerah dan Pusat

No	Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita Ketiga)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025- 2029	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029
	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Misi 1: Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan.	Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam Renstra 2025-2029 ini diamanatkan untuk melaksanakan misi Bupati/Wakil Bupati yaitu misi ke-3 berisi “Melanjutkan pembangunan infrastruktur”. Fokus pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan



menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan renstra mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang melaksanakan misi ke-2 dan ke-3 yaitu:

Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung misi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi, peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai, serta tata kelola anggaran yang efisien dan terbuka. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Misi ke-3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang merata dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi, perluasan aksesibilitas ke wilayah terpencil, serta pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau terus dilakukan untuk



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

meningkatkan konektivitas antarwilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menetapkan tujuan yaitu

“Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau”

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, atau dapat pula dipahami sebagai tujuan antara. Dengan demikian, suatu tujuan akan tercapai apabila sasaran yang ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pencapaian misi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Meningkatnya Infranstruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 terjadi penyesuaian antara Semester I dan Semester II sebagai dampak dari perubahan dokumen perencanaan strategis. Pada Semester I, pelaksanaan dan pelaporan kinerja sepenuhnya masih mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026 karena Renstra periode berikutnya belum ditetapkan. Oleh sebab itu, seluruh indikator kinerja, sasaran, serta target yang digunakan dalam pengukuran kinerja Semester I tetap menggunakan kerangka perencanaan lama.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Memasuki Semester II Tahun 2025, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 telah disahkan, sehingga penyusunan LKIP dilakukan dengan menyesuaikan dan mengintegrasikan indikator sasaran dari Renstra 2021 - 2026 dan Renstra 2025 - 2029. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan yang bertepatan dengan periode pemilu dan penetapan visi dan misi kepala daerah yang baru. Oleh karena itu, struktur indikator dan sasaran kinerja dalam LKIP Tahun 2025 mencerminkan proses peralihan dari perencanaan lama menuju perencanaan baru, dengan tetap menjaga kesinambungan kinerja serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara substansi, sebagian besar indikator kinerja utama tetap dipertahankan pada kedua periode Renstra, seperti pemasangan rambu-rambu, rasio izin trayek, persentase pemasangan penerangan jalan umum, jumlah barang dan arus penumpang angkutan umum, persentase layanan angkutan darat, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus, serta indikator pengujian dan kepemilikan KIR angkutan umum. Perbedaan utama terletak pada penambahan dan penyesuaian indikator pada Renstra 2025 - 2029, yaitu dimasukkannya indikator Rasio Konektivitas dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai bentuk penguatan orientasi terhadap keterpaduan jaringan transportasi dan peningkatan kualitas tata kelola kinerja. Dengan demikian, penggabungan indikator dalam LKIP Tahun 2025 merupakan upaya menjaga kesinambungan pengukuran kinerja sekaligus mengakomodasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang baru.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

1. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2025

Pada Tahun 2025, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021–2025 mencakup dua sasaran strategis utama, yaitu peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang diukur melalui nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan target B, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang, yang ditunjukkan melalui indikator seperti arus penumpang angkutan umum sebesar 536.968 orang, rasio izin trayek sebesar 2, jumlah uji KIR 236 kendaraan, satu unit pelabuhan laut/udara/terminal, persentase kepemilikan KIR sebesar 50%, pemasangan 60 unit rambu lalu lintas, serta jumlah orang dan barang yang terangkut maupun yang melalui terminal, dermaga, dan bandara yang juga mencapai 536.968.

Tabel II.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan 2025
(berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B
2	Meningkatnya Infranstruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	536.968
		Rasio Izin Trayek	2
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	236



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025
		Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis	1
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	50
		Pemasangan Rambu-Rambu	60
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	536.968
		Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	536.968

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

2. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029

Pada Tahun 2025, sasaran strategis Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Sasaran strategis tersebut mencakup peningkatan kinerja perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, serta peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi. Peningkatan kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator rasio konektivitas dan nilai SAKIP perangkat daerah, yang mencerminkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi serta kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam mendukung pelayanan publik di bidang perhubungan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Sementara itu, sasaran tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas serta meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi diukur melalui berbagai indikator operasional, seperti persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas, rasio izin trayek, persentase pemasangan Penerangan Jalan Umum, jumlah barang dan arus penumpang angkutan umum, persentase layanan angkutan darat, serta jumlah simpul transportasi berupa pelabuhan, bandar udara, dan terminal bus. Selain itu, aspek keselamatan transportasi dipantau melalui jumlah uji KIR angkutan umum dan persentase kepemilikan KIR sebagai indikator kelayakan teknis kendaraan. Seluruh indikator dan target Tahun 2025 tersebut dirancang sebagai tahapan awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, yang menjadi dasar penguatan sistem transportasi daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan 2025
(berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029)

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025
		Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	1 Rasio Konektivitas	82,5
Akuntabilitas Kinerja	1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,85
Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi	2	Tersedianya Sarana dan Prasarana	3 Pemasangan Rambu-Rambu	3%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		2025
		Transportasi yang Berkualitas	4	Rasio Izin Trayek	0,0010%
			5	Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	7,81%
			6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	20.502
			7	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	322.076
			8	Persentase layanan angkutan darat	0,0502%
			9	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	2
Peningkatan Kualitas Pelayanan	3	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	10	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	274
			11	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	41%

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

1. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 2025
(berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B	100
1	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	536.968	325.148	60,55
		Rasio Izin Trayek	Ijin	2	3,00	150,00
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	236	242	102,54
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	1	2	200
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	50	41	82,24
		Pemasangan Rambu-Rambu	Unit	60	51	85,00
		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	536.968	325.148	60,55



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
		Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	Orang	536.968	325.148	60,55
Rata-Rata					100,16	

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu

2. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 2025
(berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau		Rasio Konektivitas	%	82,5	82,5	100
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,85	65,85	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas		Pemasangan Rambu-Rambu	%	3	2,91	97
		Rasio Izin Trayek	%	0,0010	0,0010	100
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	7,81	7,74	99,1
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Unit	20.502	20.613	100,54



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	orang	322076	325.148	100,95
		Persentase layanan angkutan darat	%	0,0502	0,0591	117,73
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	2	2	100
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	274	242	88,32
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	41	41,12	100,29
					100,36	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Tabel III.1 tentang Interval Nilai Realisasi Kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan sistem penilaian berbasis interval yang menggambarkan tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam rangka manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap capaian *output* dan *outcome* yang telah ditargetkan. Penilaian ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Sangat Baik, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah, dengan rentang nilai mulai dari 5 hingga 100. Kriteria tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pencapaian yang semakin optimal terhadap sasaran strategis yang telah direncanakan.

Selain itu, penggunaan kode warna dalam tabel berfungsi untuk mempermudah identifikasi visual terhadap capaian kinerja. Dengan sistem penilaian ini, instansi dapat dengan mudah melakukan evaluasi, menentukan prioritas perbaikan, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja di periode berikutnya guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Tabel III.1 Interval Nilai Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5	5 - 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri nomor 86 Tahun 2017



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Rangkaian capaian berikut menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama Tahun 2025.

1. Serah Terima Perlengkapan Keselamatan Jalan dari Program CSR PT Jasa Raharja

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menerima bantuan perlengkapan keselamatan jalan dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Jasa Raharja Cabang Singkawang. Bantuan tersebut terdiri dari 20 unit *traffic cone* dan 4 unit *road barrier*. Perlengkapan ini digunakan untuk mendukung peningkatan keselamatan jalan serta kegiatan pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bengkayang.

2. Pembentukan Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Dinas Perhubungan memprakarsai pembuatan dan penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor 461 / DISHUB / TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kepolisian Resor Bengkayang. Tim ini bertugas menertibkan parkir liar, menata lokasi parkir resmi, serta memastikan penerapan retribusi parkir berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Dakgar Lantas Lintas Sektoral

Dinas Perhubungan berperan aktif dalam kegiatan Dakgar Lantas Lintas Sektoral yang dilaksanakan bersama pihak Kepolisian dan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan menekan jumlah kecelakaan lalu lintas, mengurangi tingkat fatalitas korban, meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta melakukan pengesahan tahunan kendaraan bermotor. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di beberapa titik strategis wilayah Kabupaten Bengkayang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

4. Kerja Sama *Blue System Full Cycle* Uji Kendaraan Pasti Berkeselamatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penerapan sistem *Blue System Full Cycle* Uji Kendaraan Pasti Berkeselamatan, yaitu sistem pengujian kendaraan berbasis digital. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dengan tujuan menciptakan sinergi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengujian kendaraan bermotor. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 100.2.2.3 / 6 / PKS / 2025 dan Nomor 510 / 57 / DISHUB / 2025 tentang Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5. Penerbitan Dokumen Perizinan Kapal oleh KSOP Kelas IV Sintete

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Sintete dalam penerbitan dokumen perizinan kapal Karunia Jaya TS dan Tuna Bertuah TS. Proses penerbitan izin ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap kegiatan pelayaran di wilayah Bengkayang serta memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran yang berlaku.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

Rincian realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Program Anggaran Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan			PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	2			3	4	5	6
DINAS PERHUBUNGAN				Rp6.362.345.566	Rp5.348.274.675	Rp1.014.070.891	84,06%
Program	:	2.15.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	Rp582.703.049	87,50%
Kegiatan	:	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp73.925.850	Rp49.156.610	Rp24.769.240	66,49%
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp35.000.000	Rp24.500.000	Rp10.500.000	70,00%
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp11.483.000	Rp4.707.540	Rp6.775.460	41,00%
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp22.282.850	Rp14.859.850	Rp7.423.000	66,69%
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.160.000	Rp5.089.220	Rp70.780	98,63%
Kegiatan	:	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.610.988.371	Rp3.494.377.512	Rp116.610.859	96,77%
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.557.615.371	Rp3.442.798.372	Rp114.816.999	96,77%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan			PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2			3	4	5	6	
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp17.615.000	Rp17.615.000	Rp0	100,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp10.000.000	Rp6.206.140	Rp3.793.860	62,06%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp16.033.000	Rp16.033.000	Rp0	100,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp9.725.000	Rp9.725.000	Rp0	100,00%
	Kegiatan	:	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp7.855.000	Rp7.840.130	Rp14.870	99,81%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp4.800.000	Rp4.800.000	Rp0	100,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp3.055.000	Rp3.040.130	Rp14.870	99,51%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Kegiatan	:	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp38.841.000	Rp23.534.200	Rp15.306.800	60,59%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp17.775.000	Rp3.391.400	Rp14.383.600	19,08%
	Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp21.066.000	Rp20.142.800	Rp923.200	95,62%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan	PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	
	Kegiatan : 2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp151.445.576	Rp62.049.660	Rp89.395.916	40,97%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45.311.600	Rp0	Rp45.311.600	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp6.600.000	Rp0	Rp6.600.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp27.170.000	Rp0	Rp27.170.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp4.520.000	Rp4.383.000	Rp137.000	96,97%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp59.749.000	Rp57.666.660	Rp2.082.340	96,51%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp8.094.976	Rp0	Rp8.094.976	0,00%
	Kegiatan : 2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp229.500.000	Rp0	Rp229.500.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp229.500.000	Rp0	Rp229.500.000	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan	PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	
	Kegiatan : 2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp450.511.869	Rp408.412.232	Rp42.099.637	90,66%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Rp0	100,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp91.516.200	Rp84.542.446	Rp6.973.754	92,38%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp17.500.000	Rp0	Rp17.500.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp327.495.669	Rp309.869.004	Rp17.626.665	94,62%
	Kegiatan : 2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp100.331.400	Rp35.325.673	Rp65.005.727	35,21%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp47.016.000	Rp28.022.873	Rp18.993.127	59,60%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp38.224.600	Rp7.302.800	Rp30.921.800	19,10%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp3.310.800	Rp0	Rp3.310.800	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.600.000	Rp0	Rp6.600.000	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan			PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	2			3	4	5	6
Program	:	2.15.02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp1.653.586.500	Rp1.257.536.070	Rp396.050.430	76,05%
Kegiatan	:	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.415.131.500	Rp1.188.324.970	Rp226.806.530	83,97%
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.209.240.000	Rp1.160.137.353	Rp49.102.647	95,94%
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp205.891.500	Rp28.187.617	Rp177.703.883	13,69%
Kegiatan	:	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp18.920.000	Rp11.692.500	Rp7.227.500	61,80%
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp18.920.000	Rp11.692.500	Rp7.227.500	61,80%
Kegiatan	:	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp42.035.000	Rp12.228.000	Rp29.807.000	29,09%
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp42.035.000	Rp12.228.000	Rp29.807.000	29,09%
Kegiatan	:	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp114.309.000	Rp15.461.900	Rp98.847.100	13,53%
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp99.940.000	Rp15.461.900	Rp84.478.100	15,47%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan	PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	
	Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp5.025.000	Rp0	Rp5.025.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp9.344.000	Rp0	Rp9.344.000	0,00%
	Kegiatan : 2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp10.432.000	Rp0	Rp10.432.000	0,00%
	Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp10.432.000	Rp0	Rp10.432.000	0,00%
	Kegiatan : 2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp32.719.000	Rp10.344.700	Rp22.374.300	31,62%
	Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp19.899.000	Rp10.344.700	Rp9.554.300	51,99%
	Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.820.000	Rp0	Rp12.820.000	0,00%
	Kegiatan : 2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan			PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2			3	4	5	6	
	Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Kegiatan	:	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.040.000	Rp19.484.000	Rp556.000	97,23%
	Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp20.040.000	Rp19.484.000	Rp556.000	97,23%
	Program	:	2.15.03	Pengelolaan Pelayaran	Rp45.360.000	Rp10.042.588	Rp35.317.412	22,14%
	Kegiatan	:	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Kegiatan	:	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp35.181.000	Rp0	Rp35.181.000	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan			PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)	
1	2			3	4	5	6	
	Sub Kegiatan	:	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
	Sub Kegiatan	:	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp35.181.000	Rp0	Rp35.181.000	0,00%
	Kegiatan	:	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp10.179.000	Rp10.042.588	Rp136.412	98,66%
	Sub Kegiatan	:	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp10.179.000	Rp10.042.588	Rp136.412	98,66%

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2025, sebagai berikut.

1. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III.3 Sasaran Dinas Perhubungan
(Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B	100
2	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	536.968	325.148	60,55
		Rasio Izin Trayek	Ijin	2	3,00	150,00
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	236	242	102,54
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	1	2	200
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	50	41	82,24
		Pemasangan Rambu-Rambu	Unit	60	51	85,00
		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	536.968	325.148	60,55



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
		Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	Orang	536.968	325.148	60,55
Rata-Rata					100,16	

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu

Dari tabel III.3 di atas memperlihatkan bahwa rata rata pencapaian ke-8 (delapan) indikator sasaran adalah sebesar 100,16% ini berarti tingkat pencapaian berada pada interval nilai 91 – 100 dengan kategori Sangat Baik (Hijau Tua).

2. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029

Tabel III.4 Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan
(Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau		Rasio Konektivitas	%	82,5	82,5	100
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,85	65,85	100
	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Pemasangan Rambu-Rambu	%	3	2,91	97



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kinerja	
					Realisasi	Capaian
	Transportasi yang Berkualitas	Rasio Izin Trayek	%	0,0010	0,0010	100
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	7,81	7,74	99,1
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Unit	20.502	20.613	100,54
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	orang	322076	325.148	100,95
		Persentase layanan angkutan darat	%	0,0502	0,0591	117,73
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	2	2	100
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	274	242	88,32
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	41	41,12	100,29
					100,36	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Dari tabel III.4 di atas memperlihatkan bahwa rata rata pencapaian ke delapan indikator sasaran adalah sebesar 100,36% ini berarti tingkat pencapaian berada pada interval nilai 91 - 100 dengan kategori Sangat Baik (Hijau Tua).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

I. BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021 – 2026

a. Sasaran Strategis 1

Berdasarkan Tabel III.5, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada tahun 2025 yang berfokus pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan hasil yang optimal. Indikator yang digunakan yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target kategori B (65,85), dan realisasi yang diperoleh juga sebesar 65,85 sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, serta mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Tabel III.5 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B (65,85)	65,85	100
Capaian Kinerja					100

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat telah berjalan efektif. Meskipun target telah tercapai secara maksimal, evaluasi dan inovasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan nilai pada kategori yang lebih tinggi di tahun berikutnya, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

Berdasarkan Tabel III.6, efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang baik. Dari total anggaran sebesar Rp4.663.399.066, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp4.080.696.017 atau sebesar 87,50%, sementara capaian kinerja program mencapai 100%. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 12,50%, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel III.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	87,50	100	12,50
Jumlah			Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	87,50	100	12,50

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.7, realisasi kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang diukur melalui Nilai Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai yang diperoleh sebesar 53,45 dengan predikat CC, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 64,65 dengan predikat B, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 65,85 dengan predikat B. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik serta upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Secara bertahap, capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, sekaligus memperlihatkan bahwa strategi dan program yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan penilaian publik.

Tabel III.7 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	53,45 Predikat CC	64,65 Predikat B	65,85 Predikat B

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.8, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 - 2025 dengan target RPJMD Tahun 2025 pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menunjukkan adanya tren peningkatan yang positif, namun belum sepenuhnya mencapai target akhir yang ditetapkan. Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 53,45 dengan predikat CC, meningkat pada tahun 2024 menjadi 64,65 dengan predikat B, dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 65,85 dengan predikat B. Sementara itu, target RPJMD Tahun 2025 ditetapkan pada rentang nilai 70,00 - 79,99 dengan predikat BB. Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan capaian secara bertahap setiap tahunnya, realisasi tahun 2025 masih berada di bawah target RPJMD yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya strategis dan inovasi berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar dapat mencapai predikat BB sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel III.8 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	53,45 Predikat CC	64,65 Predikat B	65,85 Predikat B	70,00 - 79,99 Predikat BB

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan tabel III.9 terkait uraian penyebab peningkatan, hambatan, dan solusi, capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren positif dari 53,45 (Predikat CC) pada tahun 2023 menjadi 64,65 (Predikat B) pada tahun 2024 dan 65,85 (Predikat B) pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik melalui pembenahan prosedur, peningkatan disiplin dan sikap aparatur, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, peningkatan tersebut belum signifikan karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, pemenuhan fasilitas pendukung, optimalisasi teknologi informasi, dan tindak lanjut hasil SKM secara konsisten sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Tabel III.9 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	53,45 Predikat CC	64,65 Predikat B	65,85 Predikat B	Peningkatan nilai SKM dari 53,45 (Predikat CC) pada tahun 2023 menjadi 64,65 (Predikat B) pada tahun 2024 dan 65,85 (Predikat B) pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh upaya perbaikan prosedur pelayanan,	Meskipun terjadi peningkatan, nilai SKM belum menunjukkan kenaikan yang signifikan karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, pemahaman aparatur terhadap	Solusi yang dilakukan dan perlu ditingkatkan adalah penguatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi pelayanan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
						peningkatan disiplin dan sikap pelayanan aparatur, serta mulai diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.	standar pelayanan yang belum merata, serta partisipasi masyarakat dalam penyampaian penilaian dan pengaduan pelayanan yang masih terbatas.	publik, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, hasil SKM perlu ditindaklanjuti secara konsisten sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna mendorong peningkatan nilai SKM pada tahun berikutnya.

Sumber : Dishub Kab. Bengkulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

b. Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Tabel III.10, perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2 menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing indikator, namun secara keseluruhan memperoleh capaian kinerja sebesar 101,64%. Beberapa indikator melampaui target, seperti Rasio Izin Trayek dengan capaian 150%, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum sebesar 102,54%, serta Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang mencapai 200%. Pemasangan rambu-rambu juga hampir memenuhi target dengan capaian 96,67%. Namun demikian, terdapat indikator yang belum mencapai target, antara lain Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, Jumlah Orang/Barang yang Terangkut, serta Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal yang masing-masing hanya mencapai 60,55%, serta Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 82,24%. Secara umum, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal, keberhasilan pada indikator lainnya mampu mendorong capaian kinerja sasaran secara agregat melebihi 100%, yang mencerminkan kinerja pembangunan sektor transportasi yang cukup baik pada tahun 2025.

Tabel III.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	536.968	325.148	60,55
		Rasio Izin Trayek	2	3,00	150
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	236	242	102,54
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	1	2	200
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	50	41	82,24
		Pemasangan Rambu-Rambu	60	58	96,67
		Jumlah Orang/Barang yang	536.968	325.148	60,55



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Terangkut Angkutan Umum			
		Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	536.968	325.148	60,55
Capaian Kinerja					101,64

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Perbedaan capaian antar indikator tersebut menunjukkan bahwa aspek pelayanan administratif dan pengawasan teknis transportasi cenderung lebih terkendali dan terukur, sementara indikator yang berkaitan dengan pergerakan orang dan barang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, mobilitas masyarakat, serta dinamika kebutuhan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi antara peningkatan infrastruktur, optimalisasi layanan angkutan umum, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendorong peningkatan arus penumpang dan barang sehingga seluruh indikator dapat mencapai target secara lebih seimbang pada periode berikutnya.

Selain itu, capaian yang melebihi 100% pada beberapa indikator juga perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan bukan semata akibat penetapan target yang relatif rendah. Evaluasi berbasis data dan perencanaan yang lebih presisi sangat penting agar penetapan target pada tahun selanjutnya semakin realistis, terukur, dan selaras dengan kondisi lapangan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan transportasi dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kelancaran pergerakan orang dan barang di Kabupaten Bengkayang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.11 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 2, yaitu meningkatnya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berguna untuk mendukung pergerakan orang dan barang, secara umum berada pada kategori efisien. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki anggaran sebesar Rp1.653.586.500 dengan realisasi Rp1.257.536.070 atau 76,05% dari target, menghasilkan tingkat efisiensi 13,95% dengan capaian kinerja 90%. Sementara itu, Program Pengelolaan Pelayaran dengan anggaran Rp45.360.000 terealisasi Rp10.042.588 atau 22,14% dari target, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi sebesar 72,86% dengan capaian kinerja 95%. Secara keseluruhan, total anggaran Rp1.698.946.500 terealisasi Rp1.267.578.658 dengan capaian kinerja kumulatif 98,19% dan tingkat efisiensi 86,81%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dengan hasil kinerja yang sangat baik.

Tabel III.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.653.586.500	1.257.536.070	76,05	90	13,95
		Pengelolaan Pelayaran	45.360.000	10.042.588	22,14	95	72,86
Jumlah			Rp1.698.946.500	Rp1.267.578.658	98,19	185	86,81

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.12 menunjukkan dinamika realisasi kinerja Sasaran Strategis 2 selama tahun 2023 - 2025 yang secara umum berfluktuasi pada beberapa indikator. Jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat dari 486.728 orang pada 2023 menjadi 546.196 orang pada 2024, namun menurun cukup signifikan menjadi 325.148 orang pada 2025, yang juga tercermin pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut serta yang melalui dermaga, bandara, dan terminal. Rasio izin trayek relatif stabil pada angka 4 trayek di tahun 2023 dan 2024, kemudian menurun menjadi 3 trayek pada 2025. Sementara itu, jumlah uji KIR angkutan umum menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap dari 226 kendaraan menjadi 230 kendaraan dan 242 kendaraan. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus menurun dari 6 unit pada 2023 menjadi 2 unit pada 2024 dan tetap pada 2025. Persentase kepemilikan KIR tercatat 226 dan 230 pada dua tahun awal kemudian menjadi 41 pada 2025, sedangkan pemasangan rambu-rambu meningkat tajam pada 2024 menjadi 213 unit dibanding 84 unit pada 2023, namun kembali turun menjadi 58 unit pada 2025. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pengujian kendaraan, namun terjadi penurunan pada mobilitas penumpang dan beberapa indikator sarana prasarana di tahun terakhir.

Sasaran strategis yang diukur dalam tabel ini adalah meningkatnya infrastruktur serta sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Sasaran ini berorientasi pada terwujudnya sistem transportasi yang aman, lancar, dan berkelanjutan melalui ketersediaan fasilitas transportasi yang memadai, kepatuhan kendaraan terhadap standar keselamatan, serta meningkatnya aksesibilitas layanan transportasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, indikator yang digunakan mencerminkan baik aspek pelayanan (jumlah penumpang, pergerakan orang/barang) maupun aspek pendukung operasional (izin trayek, uji KIR, rambu, dan simpul transportasi).

Dengan melihat capaian tiap indikator, dapat disimpulkan bahwa sasaran belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena masih terdapat penurunan pada indikator mobilitas dan sarana prasarana tertentu, meskipun aspek keselamatan kendaraan menunjukkan tren yang membaik. Hal ini menandakan perlunya penguatan kebijakan dan program yang lebih terintegrasi agar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

peningkatan infrastruktur dan layanan transportasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan fasilitas, tetapi juga mampu mendorong peningkatan penggunaan layanan transportasi oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel III.12 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148
		Rasio Izin Trayek	4	4	3
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	6	2	2
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41
		Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	58
		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148
		Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	486.728	546.196	325.148

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Pada Tabel III.13 di bawah ini dijelaskan bahwa secara keseluruhan, capaian pada sasaran strategis meningkatnya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang dapat dinilai telah berjalan optimal karena sebagian besar indikator menunjukkan bahwa fungsi layanan transportasi tetap terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari terselenggaranya layanan angkutan umum yang masih mampu mengakomodasi pergerakan penumpang dan barang, serta meningkatnya jumlah uji KIR dari tahun ke tahun yang mencerminkan penguatan aspek keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan. Keberadaan simpul transportasi yang tetap beroperasi, rasio izin trayek yang relatif terjaga, serta tetap dilaksanakannya pemasangan rambu lalu lintas juga menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana transportasi terus dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator seperti jumlah penumpang dan pemasangan rambu, kondisi tersebut tidak mengganggu secara signifikan keberlangsungan pelayanan transportasi secara umum sehingga sasaran strategis dapat dikategorikan tercapai secara cukup efektif.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang tidak terdapat indikator maupun target yang secara spesifik memuat sasaran strategis ini, sehingga tidak tersedia target RPJMD Tahun 2025 sebagai pembanding capaian kinerja. Dengan demikian, evaluasi terhadap sasaran ini dilakukan berdasarkan realisasi tahunan perangkat daerah dan analisis tren perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, tanpa mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.13 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	-
		Rasio Izin Trayek	4	4	3	
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242	
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	6	2	2	
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41	
		Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	58	
		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	
		Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	486.728	546.196	325.148	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Secara keseluruhan berdasarkan Tabel III.14, penyebab peningkatan dan penurunan capaian indikator pada sasaran strategis ini dipengaruhi oleh dinamika mobilitas masyarakat, perubahan minat penggunaan angkutan umum, dukungan maupun keterbatasan anggaran, penyesuaian metode pengukuran indikator, serta faktor operasional seperti ketersediaan sarana prasarana dan jumlah armada aktif. Hambatan yang dihadapi secara umum meliputi rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum, kepatuhan operator yang belum optimal, keterbatasan sarana pengujian dan pengawasan, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan konektivitas antar moda. Adapun solusi yang dilakukan secara menyeluruh diarahkan pada peningkatan kualitas layanan angkutan umum, penguatan pembinaan dan pengawasan operator, peningkatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pemanfaatan fasilitas transportasi yang ada, standarisasi metode pengukuran indikator, serta prioritas program keselamatan dan pemeliharaan prasarana. Dengan demikian, secara umum upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola, dan optimalisasi sarana prasarana guna mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis secara berkelanjutan.

Secara implikatif, rangkaian penyebab, hambatan, dan solusi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan, tingkat kepatuhan pemangku kepentingan, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan kinerja ke depan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui perencanaan berbasis data, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja transportasi daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.14 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Meningkatnya Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Transportasi yang Handal untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	Peningkatan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada tahun 2025, target dan realisasi jumlah penumpang sengaja diturunkan dengan mempertimbangkan menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta peralihan ke kendaraan pribadi.	Minat masyarakat terhadap angkutan umum masih rendah dan kualitas layanan belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna.	Peningkatan kualitas layanan angkutan umum serta pengaturan trayek dan jadwal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
		Rasio Izin Trayek	4	4	3	Penurunan rasio izin trayek pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah armada aktif dan tidak diperpanjangnya izin trayek yang tidak memenuhi ketentuan.	Kepatuhan operator angkutan dalam pengurusan izin trayek masih rendah dan terdapat keterbatasan pengawasan.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan serta mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242	Peningkatan jumlah uji KIR dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan meningkatnya kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum terhadap ketentuan keselamatan dan kelayakan kendaraan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berperan dalam pemberian rekomendasi uji KIR, sedangkan penerbitan bukti lulus uji berupa Blue-e dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang, sehingga realisasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar daerah dan kesiapan sarana pengujian.	Keterbatasan sarana pengujian dan masih adanya kendaraan yang belum melakukan uji KIR secara rutin.	Memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, meningkatkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan angkutan umum, serta mendorong kepatuhan uji KIR melalui pembinaan dan penertiban secara berkelanjutan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	6	2	2	Penurunan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus terjadi karena tidak adanya perencanaan penambahan bangunan fisik prasarana transportasi pada periode berjalan, serta adanya rasionalisasi fungsi fasilitas yang ada.	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas transportasi.	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan prasarana transportasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41	Penurunan nilai pada tahun 2025 dipengaruhi oleh perbaikan dan penyesuaian metode penghitungan indikator. Pada tahun 2023–2024, pengukuran masih menggunakan angka jumlah kendaraan yang memiliki KIR, sehingga belum mencerminkan persentase kepemilikan KIR secara riil. Mulai tahun 2025, penghitungan menggunakan rasio antara jumlah kendaraan yang memiliki KIR dengan total kendaraan angkutan umum, sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat dan menyebabkan perubahan angka yang signifikan.	Perbedaan metode penghitungan pada tahun sebelumnya menyebabkan ketidakkonsistenan data, ditambah masih terdapat kendaraan angkutan umum yang belum melakukan uji KIR secara berkala serta keterbatasan pemahaman pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji KIR.	Melakukan standarisasi metode penghitungan indikator, peningkatan pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan umum, serta sosialisasi kewajiban uji KIR secara berkelanjutan kepada pemilik dan operator kendaraan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	58	Peningkatan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh dukungan anggaran dan program peningkatan keselamatan lalu lintas, sedangkan penurunan pada tahun 2025 disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan lain.	Keterbatasan anggaran dan kerusakan rambu akibat faktor cuaca dan lingkungan.	Prioritisasi lokasi rawan kecelakaan dan pemeliharaan rambu secara berkala sesuai kebutuhan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	Tren perubahan mengikuti jumlah arus penumpang angkutan umum, di mana penurunan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berkurangnya penggunaan angkutan umum oleh masyarakat.	Persaingan dengan kendaraan pribadi dan terbatasnya jangkauan layanan angkutan umum.	Pengembangan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.
		Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	486.728	546.196	325.148	Penurunan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas pergerakan orang dan barang serta terbatasnya operasional sarana dan prasarana transportasi.	Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan keterbatasan konektivitas antar moda.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi fungsi dermaga, bandara, dan terminal.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



II. BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029

a. Sasaran Strategis 1

Berdasarkan Tabel III.15, Sasaran Strategis 1 yaitu tersedianya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian maksimal. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah rasio konektivitas, dengan target yang ditetapkan sebesar 82,5% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 82,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan di sektor transportasi telah berjalan secara efektif dan konsisten dengan target yang telah ditentukan.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan keterhubungan jaringan transportasi antar wilayah telah terlaksana secara optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Secara keseluruhan, capaian tersebut menempatkan kinerja Sasaran Strategis 1 dalam kategori sangat berhasil karena tidak terdapat selisih antara target dan realisasi, yang menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi program.

Tabel III.15 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	82,5	82,5	100
Capaian Kinerja					100

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.16, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 1 menunjukkan hasil yang sangat baik karena seluruh program mampu mencapai kinerja maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari target. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.653.586.500 dengan realisasi Rp1.257.536.070 atau 76,05%, namun tetap menghasilkan capaian kinerja 100% sehingga tingkat efisiensinya tercatat 23,95%. Sementara itu, Program Pengelolaan Pelayaran menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dengan realisasi anggaran hanya Rp10.042.588 dari pagu Rp45.360.000 atau 22,14%, namun juga mampu mencapai kinerja 100% dengan tingkat efisiensi 77,86%. Secara keseluruhan, total anggaran sebesar Rp1.698.946.500 direalisasikan Rp1.267.578.658 atau 74,61% dengan akumulasi capaian kinerja 200% dan tingkat efisiensi 101,81%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran ini tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Tabel III.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tersedianya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.653.586.500	1.257.536.070	76,05	100	23,95
		Pengelolaan Pelayaran	45.360.000	10.042.588	22,14	100	77,86
Jumlah			Rp1.698.946.500	Rp1.267.578.658	74,61	200	101,81

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.17, perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 yaitu tersedianya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau menunjukkan bahwa indikator rasio konektivitas baru memiliki data capaian pada tahun 2025 sebesar 82,5%, sementara pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat realisasi atau belum dilakukan pengukuran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut mulai digunakan atau diukur secara lebih sistematis pada tahun 2025 sebagai tolak ukur kinerja layanan transportasi. Dengan adanya capaian di tahun 2025, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah memiliki dasar pengukuran yang lebih jelas untuk menilai tingkat keterhubungan jaringan transportasi, sekaligus menjadi baseline penting untuk evaluasi dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel III.17 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Tersedianya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	-	-	82,5

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.18, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada indikator rasio konektivitas tahun 2025 telah selaras dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sama-sama berada pada angka 82,5%. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan transportasi daerah telah berada pada jalur yang tepat serta konsisten dengan perencanaan jangka menengah daerah. Dengan tercapainya target RPJMD tersebut, kinerja perangkat daerah tidak hanya dinilai berhasil secara tahunan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam menjaga keberlanjutan kualitas layanan transportasi pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel III.18 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Tersedianya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	-	-	82,5	82,5

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Secara umum, capaian Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan terealisasinya rasio konektivitas sebesar 82,5% pada tahun 2025, yang sekaligus menjadi capaian awal sejak indikator ini mulai diterapkan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Pencapaian tersebut menandakan bahwa arah kebijakan dan implementasi program pembangunan transportasi telah berjalan selaras dengan target yang direncanakan, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal pada tahun pertama pengukuran. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya dukungan perencanaan yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dalam meningkatkan keterhubungan jaringan transportasi.

Di sisi lain, meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait belum meratanya konektivitas antar wilayah serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di beberapa titik layanan transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan transportasi belum sepenuhnya merata, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan aksesibilitas transportasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Tantangan tersebut juga menjadi indikator bahwa peningkatan layanan transportasi tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi juga pada pemerataan kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan ke depan adalah mempertahankan capaian rasio konektivitas melalui optimalisasi pemanfaatan jaringan transportasi yang telah tersedia, peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sektor, serta penguatan perencanaan program lanjutan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengembangan layanan transportasi dapat semakin efektif, merata, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan wilayah secara berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.19 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Tersedianya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	-	-	82,5	Realisasi Rasio Konektivitas pada tahun 2025 sebesar 82,5% merupakan capaian awal pelaksanaan indikator yang baru ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, di mana target tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,5%. Tidak tersedianya data pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan karena indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja daerah pada periode sebelumnya.	Meskipun target tahun 2025 telah tercapai, masih terdapat tantangan berupa belum meratanya konektivitas antar wilayah serta keterbatasan sarana pendukung pada beberapa titik layanan transportasi.	Mempertahankan capaian Rasio Konektivitas melalui optimalisasi jaringan transportasi yang telah tersedia, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan perencanaan program lanjutan sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



b. Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Tabel III.20, Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang optimal pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari indikator nilai SAKIP perangkat daerah yang ditargetkan sebesar 65,85 dan berhasil direalisasikan pada angka yang sama, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Kesesuaian antara target dan realisasi tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian ini juga menunjukkan adanya konsistensi dan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan manajemen kinerja. Dengan tercapainya nilai SAKIP sesuai target, kinerja organisasi dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan evaluasi kinerja, peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan agar kinerja perangkat daerah semakin akuntabel dan berkelanjutan.

Tabel III.20 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategi 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,85	65,85	100
Capaian Kinerja					100

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.21, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 2 menunjukkan kinerja yang baik karena program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mampu mencapai capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Dari total anggaran sebesar Rp4.663.399.066, realisasi yang digunakan sebesar Rp4.080.696.017 atau 87,50%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 12,50%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program penunjang telah berjalan efektif dan efisien, di mana target kinerja dapat dicapai secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran, sekaligus menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

Tabel III.21 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	87,50	100	12,50
Jumlah			Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	87,50	100	12,50

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.22, realisasi kinerja Sasaran Strategis 2 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Nilai SAKIP perangkat daerah tercatat sebesar 53,45 pada tahun 2023, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 64,65 pada tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 65,85 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen kinerja, termasuk penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pengukuran capaian, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, tren positif tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tata kelola organisasi.

Tabel III.22 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	53,45	64,65	65,85

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.23, perkembangan realisasi kinerja Sasaran Strategis 2 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 hingga 2025, di mana nilai SAKIP perangkat daerah meningkat dari 53,45 pada tahun 2023 menjadi 64,65 pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 65,85 pada tahun 2025. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan akuntabilitas kinerja, terutama dalam aspek perencanaan berbasis hasil, konsistensi pengukuran indikator, serta kualitas pelaporan kinerja. Secara bertahap, kinerja perangkat daerah semakin mendekati standar yang diharapkan dalam kerangka peningkatan tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 yaitu rentang nilai 70,00-79,99 dengan predikat BB, capaian tahun 2025 masih berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan yang positif, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja, khususnya melalui penguatan evaluasi internal, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Tabel III.23 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	53,45	64,65	65,85	70,00 - 79,99 Predikat BB

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Secara umum, kinerja Sasaran Strategis 2 menunjukkan perkembangan yang positif dengan adanya peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah secara konsisten dari tahun 2023 hingga 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik, terutama pada aspek perencanaan kinerja yang lebih terarah, pengukuran indikator yang lebih jelas, serta pelaporan dan evaluasi kinerja yang semakin sistematis. Kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, meskipun tren peningkatan telah tercapai, masih terdapat beberapa hambatan yang memerlukan perhatian, seperti belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta belum meratanya pemahaman aparatur dalam penyusunan dokumen SAKIP. Hambatan ini menunjukkan bahwa proses penguatan manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan agar kualitas implementasi dapat lebih konsisten di seluruh unit kerja dan tidak hanya terpusat pada aspek administratif.

Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan ke depan adalah meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan pendampingan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan nilai SAKIP perangkat daerah dapat terus meningkat dan mampu mencapai target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi secara menyeluruh. Adapun Penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala, dan solusi sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel III.24 di bawah ini.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Tabel III.24 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	53,45	64,65	65,85	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari 53,45 pada tahun 2023 menjadi 64,65 pada tahun 2024 dan 65,85 pada tahun 2025 dipengaruhi oleh perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja yang semakin terstruktur dan konsisten.	Meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta pemahaman aparaturnya terhadap penyusunan dokumen SAKIP yang belum merata.	Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan nilai SAKIP pada tahun berikutnya.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



c. Sasaran Strategis 3

Berdasarkan Tabel III.25, kinerja Sasaran Strategis 3 yaitu tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian kinerja keseluruhan sebesar 102,19%. Capaian ini menandakan bahwa secara umum target yang telah ditetapkan tidak hanya terpenuhi, tetapi juga sebagian indikator berhasil melampaui target, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi.

Beberapa indikator bahkan mencatat capaian di atas 100%, seperti jumlah barang yang terangkut angkutan umum sebesar 100,54%, jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 100,95%, serta persentase layanan angkutan darat yang mencapai 117,73%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas transportasi serta optimalisasi layanan yang berdampak pada meningkatnya mobilitas orang dan barang. Selain itu, indikator rasio izin trayek dan jumlah pelabuhan/terminal juga telah mencapai target sepenuhnya, yang menunjukkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, indikator pemasangan rambu-rambu dan persentase pemasangan penerangan jalan umum (PJU) meskipun belum sepenuhnya mencapai target, namun realisasinya tetap sangat tinggi masing-masing sebesar 97% dan 99,1%, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap capaian keseluruhan. Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi telah berjalan efektif, terukur, dan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi, sekaligus memperkuat dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.



Tabel III.25 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategi 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Pemasangan Rambu-Rambu	3	2,91	97
		Rasio Izin Trayek	0,0010	0,0010	100
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	7,81	7,74	99,1
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	20.502	20.613	100,54
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	322.076	325.148	100,95
		Persentase layanan angkutan darat	0,0502	0,0591	117,73
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	2	2	100
Capaian Kinerja					102,19

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Berdasarkan Tabel III.26, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 3 menunjukkan hasil yang baik karena capaian kinerja program dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki anggaran sebesar Rp1.653.586.500 dengan realisasi Rp1.257.536.070 atau 76,05% dan menghasilkan capaian kinerja 95%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 18,95%. Sementara itu, Program Pengelolaan Pelayaran menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dengan realisasi anggaran hanya Rp10.042.588 dari pagu Rp45.360.000 atau 22,14%, namun tetap mampu mencapai kinerja 100% dengan tingkat efisiensi 77,86%.



Secara keseluruhan, total anggaran sebesar Rp1.698.946.500 direalisasikan sebesar Rp1.267.578.658 atau 74,61% dengan akumulasi capaian kinerja 195% dan tingkat efisiensi 96,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran ini tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mampu mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas secara optimal dengan pengelolaan anggaran yang baik.

Tabel III.26 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.653.586.500	1.257.536.070	76,05	95	18,95
		Pengelolaan Pelayaran	45.360.000	10.042.588	22,14	100	77,86
Jumlah			Rp1.698.946.500	Rp1.267.578.658	74,61	195	96,81

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Berdasarkan Tabel III.27, perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis 3 selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang beragam pada masing-masing indikator. Beberapa indikator mengalami perubahan cukup signifikan, seperti pemasangan rambu-rambu yang meningkat dari 84 unit pada tahun 2023 menjadi 213 unit pada tahun 2024, kemudian tercatat 2,91% pemasangan rambu-rambu pada tahun 2025 sesuai satuan pengukuran terbaru, serta jumlah arus penumpang angkutan umum yang sempat meningkat pada tahun 2024 menjadi 546.196 orang sebelum menurun menjadi 325.148 orang pada tahun 2025. Di sisi lain, indikator rasio izin trayek dan jumlah pelabuhan/terminal menunjukkan kecenderungan stabil pada tahun 2025, sementara beberapa indikator seperti persentase pemasangan PJU, jumlah barang terangkut, dan persentase layanan angkutan darat baru memiliki data pada tahun 2025. Secara umum, perbandingan ini menunjukkan adanya penyesuaian indikator serta perkembangan kinerja layanan transportasi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, pengukuran, dan kondisi operasional dari waktu ke waktu.

Tambahan analisis menunjukkan bahwa variasi capaian antar indikator mencerminkan fokus pembangunan yang berbeda pada tiap periode, di mana peningkatan pada beberapa aspek infrastruktur dan layanan transportasi belum sepenuhnya diikuti oleh indikator lain karena perbedaan prioritas program serta ketersediaan data. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penguatan sistem pengukuran kinerja dan konsistensi indikator sangat penting agar tren kinerja dapat dibandingkan secara lebih akurat dari tahun ke tahun, sehingga evaluasi kebijakan dan perencanaan program di bidang transportasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.



Tabel III.27 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	2,91
		Rasio Izin Trayek	4	4	0,0010
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	7,74
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	-	20.613
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	486.728	546.196	325.148
		Persentase layanan angkutan darat	-	-	0,0591
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	6	2	2

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Berdasarkan Tabel III.28, perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis 3 menunjukkan bahwa berbagai indikator penyediaan sarana dan prasarana transportasi tetap dilaksanakan dan memiliki capaian pada tahun 2025, meskipun tidak seluruh indikator memiliki target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Data realisasi yang tersedia lebih menggambarkan perkembangan pelaksanaan program dan kondisi layanan transportasi dari tahun ke tahun tanpa adanya tolok ukur perbandingan terhadap target pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis ketiga tidak termasuk sebagai sasaran yang secara langsung ditargetkan dalam RPJMD, sehingga evaluasi kerjanya lebih bersifat deskriptif sebagai gambaran pelaksanaan program pendukung layanan transportasi.

Tabel III.28 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	2,91	-
		Rasio Izin Trayek	4	4	0,0010	
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	7,74	
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	-	20.613	
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	
		Persentase layanan angkutan darat	-	-	0,0591	
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	6	2	2	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Secara umum, berdasarkan Tabel III.29, capaian pada Sasaran Strategis 3 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan maupun kondisi operasional layanan transportasi. Peningkatan pada beberapa indikator terjadi karena adanya dukungan program keselamatan, peningkatan aktivitas transportasi, serta mulai terdatanya indikator baru. Sementara itu, penurunan pada indikator tertentu lebih disebabkan oleh perubahan metode pengukuran, penyesuaian target, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan fokus kegiatan diarahkan pada pemeliharaan dan optimalisasi sarana yang sudah tersedia.

Di sisi lain, hambatan yang dihadapi secara umum meliputi keterbatasan anggaran, luasnya wilayah pelayanan, kepatuhan operator angkutan yang belum optimal, serta masih terbatasnya jangkauan dan kualitas layanan transportasi di beberapa wilayah. Selain itu, tingkat pemanfaatan fasilitas transportasi yang belum merata juga menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas layanan, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Oleh karena itu, solusi yang dilakukan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas layanan secara bertahap, antara lain melalui prioritas pemeliharaan dan pemasangan sarana keselamatan pada lokasi strategis, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi dapat semakin efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih merata serta berkelanjutan bagi masyarakat.



Tabel III.29 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Pemasangan Rambu-Rambu	84	213	2,91	Peningkatan jumlah rambu pada tahun 2024 dipengaruhi oleh dukungan anggaran dan program peningkatan keselamatan lalu lintas. Penurunan signifikan pada tahun 2025 terjadi karena pengukuran dilakukan dalam bentuk rasio/persentase capaian, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan fokus kegiatan lebih diarahkan pada pemeliharaan rambu eksisting dibanding pemasangan baru.	Keterbatasan anggaran, kerusakan rambu akibat faktor lingkungan, serta luasnya wilayah pelayanan.	Prioritisasi pemasangan dan pemeliharaan rambu pada lokasi rawan kecelakaan serta pemeliharaan berkala.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Rasio Izin Trayek	4	4	0,0010	Nilai rasio relatif stabil pada tahun 2023-2024. Penurunan pada tahun 2025 disebabkan oleh tidak diperpanjangnya izin trayek oleh sebagian operator angkutan, serta penyesuaian metode penghitungan berbasis rasio.	Kepatuhan operator angkutan dalam memperpanjang izin trayek masih belum optimal.	Pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan serta fasilitasi proses perizinan trayek.
		Persentase Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	7,74	Capaian tahun 2025 sebesar 7,74% merupakan realisasi awal karena indikator ini baru diukur pada tahun berjalan, dengan pemasangan PJU dilakukan secara bertahap sesuai prioritas lokasi.	Keterbatasan anggaran dan kebutuhan PJU yang masih tinggi di beberapa ruas jalan.	Pemasangan PJU secara bertahap sesuai prioritas keselamatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	-	20.613	Realisasi tahun 2025 sebesar 20.613 menunjukkan mulai terdatanya pergerakan barang melalui angkutan umum, seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang.	Keterbatasan armada dan belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk distribusi barang.	Optimalisasi peran angkutan umum barang serta peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan sektor terkait.
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	486.728	546.196	325.148	Peningkatan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada tahun 2025, target dan realisasi sengaja diturunkan dengan mempertimbangkan menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta peralihan ke kendaraan pribadi.	Minat masyarakat terhadap angkutan umum masih rendah dan kualitas layanan belum optimal.	Peningkatan kualitas layanan, penyesuaian trayek dan jadwal angkutan umum.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Persentase layanan angkutan darat	-	-	0,0591	Capaian tahun 2025 sebesar 0,0591 merupakan hasil penghitungan rasio layanan angkutan darat terhadap kebutuhan layanan yang tersedia, dengan cakupan layanan yang masih terbatas.	Keterbatasan jangkauan layanan angkutan darat dan jumlah armada yang tersedia.	Pengembangan dan optimalisasi layanan angkutan darat sesuai kebutuhan masyarakat.
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	6	2	2	Penurunan jumlah fasilitas sejak tahun 2024 disebabkan oleh tidak adanya perencanaan penambahan bangunan fisik serta rasionalisasi fungsi prasarana. Pada tahun 2025, jumlah fasilitas telah memenuhi target.	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rendahnya tingkat pemanfaatan beberapa fasilitas.	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



d. Sasaran Strategis 4

Berdasarkan Tabel III.30, perbandingan target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 4 menunjukkan bahwa indikator jumlah uji KIR angkutan umum belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 274 unit, realisasi yang tercapai adalah 242 unit atau sebesar 88,32%. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat kendaraan angkutan umum yang belum melakukan pengujian berkala, yang kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pemilik kendaraan, keterbatasan waktu atau akses layanan pengujian, serta kondisi teknis kendaraan yang belum memenuhi persyaratan uji.

Di sisi lain, indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target 41%, realisasi mencapai 41,12% atau sebesar 100,29%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase, tingkat kepatuhan terhadap kepemilikan bukti uji laik jalan sudah berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan transportasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis 4 sebesar 94,31% termasuk dalam kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi telah berjalan efektif, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR agar target dapat tercapai sepenuhnya.

Tabel III.30 Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	274	242	88,32
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	41	41,12	100,29
Capaian Kinerja					94,31

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.31, sasaran strategis meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada baris ini terlihat bahwa anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.653.586.500 dengan realisasi Rp1.257.536.070 atau 76,05%, sementara capaian kinerja mencapai 95%. Selisih antara capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah inilah yang menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 18,95%.

Dengan demikian, seluruh uraian efisiensi yang disampaikan sebelumnya sepenuhnya didasarkan pada data pada baris nomor 1 tabel tersebut, karena hanya terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis 4 sehingga nilai pada baris jumlah juga sama dengan nilai pada baris nomor 1. Hal ini menegaskan bahwa analisis efisiensi bersumber langsung dari perbandingan target, realisasi anggaran, capaian kinerja, dan tingkat efisiensi pada baris tersebut.

Tabel III.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.653.586.500	1.257.536.070	76,05	95	18,95
Jumlah			Rp1.653.586.500	Rp1.257.536.070	76,05	95	18,95

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.32, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 hingga 2025 pada Sasaran Strategis meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi menunjukkan tren peningkatan pada indikator jumlah uji KIR angkutan umum. Pada tahun 2023 realisasi tercatat sebanyak 226 unit, meningkat menjadi 230 unit pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 242 unit pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta meningkatnya partisipasi kendaraan angkutan umum dalam melakukan uji berkala.

Selanjutnya, indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum menunjukkan adanya perbedaan satuan data antara tahun 2023 - 2024 dengan tahun 2025, di mana pada tahun 2025 tercatat sebesar 41,12%. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian metode pengukuran atau penyajian data menjadi berbasis persentase. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan kecenderungan positif terhadap tingkat kepatuhan uji laik jalan, yang berkontribusi pada peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi dari tahun ke tahun.

Tabel III.32 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41,12

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.33, fokus utama perbandingan diarahkan pada keterkaitan antara realisasi kinerja tahunan dengan target RPJMD 2025 pada Sasaran Strategis meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi. Untuk indikator jumlah uji KIR angkutan umum, realisasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 242 unit pada tahun 2025. Namun, pada tabel tidak tercantum target RPJMD 2025 untuk indikator ini, sehingga penilaian tingkat pencapaian terhadap sasaran jangka menengah belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2025 tercatat sebesar 41,12%. Keberadaan data ini menjadi gambaran posisi kinerja pada akhir periode perencanaan, meskipun informasi target RPJMD tidak ditampilkan pada tabel. Dengan demikian, tabel ini lebih menegaskan fungsi pemantauan konsistensi capaian tahunan terhadap arah kebijakan RPJMD, yaitu memastikan bahwa peningkatan kepatuhan uji laik jalan tetap sejalan dengan tujuan peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi.

Tabel III.33 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Target RPJMD 2025
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242	-
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41,12	

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Berdasarkan Tabel III.34, secara umum perkembangan kinerja pada Sasaran Strategis meningkatnya keamanan dan keselamatan transportasi menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap aspek keselamatan melalui pembinaan, pengawasan, dan penertiban angkutan umum. Selain itu, kesadaran pemilik kendaraan terhadap pentingnya kelayakan teknis kendaraan juga semakin baik, sehingga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman dan tertib.

Namun demikian, dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang bersifat struktural dan operasional. Keterbatasan kewenangan pengujian kendaraan serta ketergantungan pada fasilitas uji di daerah lain menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Di samping itu, masih adanya kendaraan yang belum patuh terhadap kewajiban uji berkala serta perbedaan pemahaman terhadap regulasi keselamatan transportasi juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan kinerja sasaran ini.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, langkah yang dilakukan berfokus pada penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha angkutan, serta pelaksanaan pembinaan dan penertiban secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan keselamatan transportasi secara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

menyeluruh sehingga pencapaian sasaran tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel III.34 Penyebab Peningkatan/Penurunan, Hambatan/Kendala, dan Solusi Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	226	230	242	Peningkatan jumlah uji KIR dari 226 (2023) menjadi 242 (2025) dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap pentingnya keselamatan transportasi serta adanya pembinaan dan penertiban kendaraan angkutan umum. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang berperan memberikan rekomendasi uji KIR, sedangkan penerbitan bukti lulus uji (Blue-e) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang, sehingga realisasi juga dipengaruhi oleh koordinasi antar daerah.	Keterbatasan kewenangan pengujian di daerah, ketergantungan pada fasilitas uji KIR di Dishub Kota Singkawang, serta masih terdapat kendaraan yang belum melakukan uji KIR secara rutin	Penguatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, peningkatan sosialisasi kepada pemilik kendaraan, serta pembinaan dan penertiban kendaraan angkutan umum secara berkelanjutan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			Penyebab Peningkatan/Penurunan	Hambatan/Kendala	Solusi
			2023	2024	2025			
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	226	230	41,12	Perubahan signifikan pada tahun 2025 (41,12) dipengaruhi oleh perbaikan metode penghitungan indikator. Pada tahun 2023–2024, pengukuran masih menggunakan angka jumlah kendaraan yang memiliki KIR, sedangkan mulai tahun 2025 penghitungan menggunakan rasio kepemilikan KIR terhadap total kendaraan angkutan umum, sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat dan menyebabkan penurunan angka secara signifikan.	Perbedaan metode penghitungan pada tahun sebelumnya menyebabkan ketidakkonsistenan data, serta masih terdapat kendaraan yang belum melakukan uji KIR secara berkala akibat keterbatasan pemahaman pemilik kendaraan.	Standarisasi metode penghitungan indikator, peningkatan pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan umum, serta sosialisasi kewajiban uji KIR secara berkelanjutan.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.362.345.566 dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.348.274.675 atau mencapai 84,06%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.014.070.891. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meskipun belum seluruh anggaran dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Kondisi belum optimalnya realisasi keuangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pencairan anggaran serta kendala administratif dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi pada Tahun 2025. Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan DPA dan telah didukung oleh penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun demikian, hingga akhir tahun anggaran sebagian SPJ tersebut belum dapat dicairkan sehingga masih tercatat sebagai kewajiban terutang karena belum diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Akibatnya, realisasi keuangan yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan secara fisik dan administratif.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp4.663.399.066, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp4.080.696.017 atau sebesar 87,50%. Program ini merupakan program dengan porsi anggaran terbesar dan memiliki tingkat realisasi yang relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa kegiatan penunjang operasional dan administrasi pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.653.586.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.257.536.070 atau 76,05%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan teknis di bidang lalu lintas dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

angkutan jalan telah terlaksana, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Adapun pada Program Pengelolaan Pelayaran, dari pagu anggaran sebesar Rp45.360.000, realisasi keuangan hanya mencapai Rp10.042.588 atau sebesar 22,14%. Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan oleh beberapa kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan secara fisik sesuai dengan DPA dan didukung oleh SPJ, namun tidak dapat dicairkan hingga akhir tahun anggaran karena belum diterbitkannya SP2D sebagai dampak dari faktor administratif dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Perlu ditegaskan bahwa permasalahan tidak terbitnya SP2D ini tidak hanya dialami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, tetapi juga oleh organisasi perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi keuangan pada beberapa program meskipun kegiatan telah dilaksanakan.

Tabel III.35 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Uraian Program Kegiatan	PAGU Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
DINAS PERHUBUNGAN		Rp6.362.345.566	Rp5.348.274.675	Rp1.014.070.891	84,06%
Program	: 2.15.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.663.399.066	Rp4.080.696.017	Rp582.703.049	87,50%
Program	: 2.15.02 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp1.653.586.500	Rp1.257.536.070	Rp396.050.430	76,05%
Program	: 2.15.03 Pengelolaan Pelayaran	Rp45.360.000	Rp10.042.588	Rp35.317.412	22,14%

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang



C. HAMBATAN DAN KENDALA

Selama Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek anggaran, realisasi fisik, maupun pencapaian indikator kinerja. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, telah dirumuskan sejumlah upaya penyelesaian sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Rincian permasalahan beserta solusi yang diupayakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.36 Permasalahan dan Solusi

No	PERMASALAHAN	No.	UPAYA - UPAYA PENYELESAIAN / SOLUSI
1	Realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal meskipun kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang telah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta melaksanakan sebagian besar kegiatan tersebut di lapangan. Namun demikian, realisasi keuangan belum sepenuhnya optimal karena terdapat kegiatan yang anggarannya tidak dapat dicairkan sehingga SP2D tidak diterbitkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama pada tahun anggaran peralihan. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Dinas Perhubungan, tetapi juga oleh sejumlah OPD lain di Kabupaten Bengkayang, sehingga berdampak pada masih adanya sisa anggaran meskipun output kegiatan telah dilaksanakan.	1	Memperkuat koordinasi teknis dan administratif dengan perangkat daerah pengelola keuangan sejak tahap perencanaan hingga proses pencairan anggaran.
		2	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, termasuk ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
		3	Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap kendala pencairan anggaran agar dapat menjadi bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.
2	Tingkat pencapaian beberapa indikator kinerja strategis masih belum maksimal Meskipun sebagian besar indikator	1	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik serta operator angkutan umum mengenai manfaat dan kewajiban uji KIR.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

No	PERMASALAHAN	No.	UPAYA - UPAYA PENYELESAIAN / SOLUSI
	kinerja telah mencapai bahkan melampaui target, masih terdapat indikator tertentu yang capaian kinerjanya belum optimal, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan transportasi seperti jumlah uji KIR dan kepemilikan KIR angkutan umum. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha angkutan umum terhadap kewajiban uji kelaikan kendaraan masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.	2	Memperkuat pengawasan dan pembinaan secara persuasif agar kepatuhan pelaku usaha meningkat tanpa menimbulkan resistensi.
		3	Mengoptimalkan sistem dan pelayanan uji KIR agar lebih mudah diakses, efisien, dan mendorong partisipasi yang lebih luas.
3	Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan di lapangan Pada beberapa kegiatan, perencanaan telah disusun dengan baik dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian kondisi lapangan, keterbatasan waktu, serta perubahan kebijakan yang menyebabkan output kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pencapaian indikator kinerja.	1	Penguatan perencanaan berbasis data dan kondisi riil lapangan.
		2	Peningkatan koordinasi internal antarbidang dalam pelaksanaan kegiatan.
		3	Penguatan monitoring dan evaluasi agar setiap deviasi dari rencana dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Sumber : Dishub Kab. Bengkayang

Berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, disusun secara sistematis dan mudah dipahami sebagai bagian dari arah perbaikan berkelanjutan.

Langkah pertama adalah penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih sinkron antara kebutuhan riil di lapangan dengan dokumen perencanaan daerah. Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berbasis data, kebutuhan aktual masyarakat, serta selaras dengan target indikator Renstra 2025–2030.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

Perencanaan yang matang diharapkan dapat meminimalkan perubahan pelaksanaan di tengah tahun dan meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja.

Langkah kedua adalah peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola keuangan, pemenuhan kelengkapan administrasi secara tepat waktu, serta pemantauan rutin terhadap proses pencairan anggaran. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan responsif, hambatan realisasi anggaran seperti keterlambatan penerbitan SP2D dapat diminimalkan.

Langkah ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas Perhubungan perlu memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap angkutan umum, khususnya terkait kewajiban uji KIR dan keselamatan transportasi. Selain itu, peningkatan kemudahan akses dan kualitas pelayanan uji KIR juga perlu terus dilakukan agar mendorong partisipasi dan kepatuhan pelaku usaha angkutan.

Langkah keempat adalah penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan pada periode berikutnya, sehingga kinerja dapat meningkat secara konsisten.

Langkah kelima adalah peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pelayanan transportasi, diharapkan dapat mendukung kinerja organisasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung sasaran strategis di bidang transportasi serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun beberapa poin kesimpulan yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2025 secara umum berada pada kategori baik, ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja strategis sesuai target Renstra, bahkan beberapa indikator mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan sektor perhubungan.
2. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah mengacu pada dokumen perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun realisasi keuangan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kendala administratif dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan tidak diterbitkannya SP2D pada sebagian kegiatan. Sebagian besar SPJ telah direalisasikan, namun belum dapat dicairkan sehingga masih tercatat sebagai kewajiban terutang. Akibatnya, realisasi keuangan belum sepenuhnya mencerminkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran. Permasalahan ini juga dialami oleh OPD lain di Kabupaten Bengkayang dan berdampak pada masih adanya sisa anggaran pada akhir tahun.



3. Dalam pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan, masih dihadapkan pada tantangan berupa optimalisasi kepatuhan terhadap aspek keselamatan transportasi, khususnya uji KIR angkutan umum, serta perlunya peningkatan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar capaian indikator kinerja dapat lebih konsisten dan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun Anggaran 2025, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program di periode selanjutnya. Saran-saran berikut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dalam memperbaiki serta mengoptimalkan kinerja organisasi di masa mendatang:

1. Untuk menindaklanjuti capaian kinerja yang telah diperoleh, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator Renstra. Perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan perlu terus diperkuat agar target kinerja dapat dicapai secara lebih efektif.
2. Guna meningkatkan optimalisasi realisasi anggaran, Dinas Perhubungan perlu memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah pengelola keuangan serta meningkatkan ketertiban dan ketepatan administrasi pencairan anggaran. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala penerbitan SP2D agar pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat diikuti dengan realisasi keuangan yang maksimal.
3. Dalam rangka mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi serta keberlanjutan kinerja ke depan, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap angkutan umum, khususnya terkait uji KIR, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Langkah ini diharapkan dapat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun Anggaran 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang 2025

memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra berikutnya berjalan lebih terarah, konsisten, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Bengkayang, Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKAYANG



FRANCISCA CYNTHIA ENTO, S.P.,M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19750614 200304 2 002